



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

NOMOR : KEP-48/M.EKON/05/2012

TENTANG

**PANITIA KHUSUS PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2012**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 06 Februari 2012, perlu dibentuk panitia khusus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Panitia Khusus Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG PANITIA KHUSUS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2012.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2012, yang terdiri dari:

- a. Panitia Khusus I;
- b. Panitia Khusus II;
- c. Panitia Khusus III; dan
- d. Panitia Khusus IV.

KEDUA : a. Susunan keanggotaan Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a, sebagai berikut:

Ketua : Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;

Wakil ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Wakil Ketua : Ir. Kuswanto Sumo Atmojo, Lembaga Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial;

- Anggota :
1. Direktur Pengairan dan Irigasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Direktur Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 3. Asisten Deputi Urusan Adaptasi Perubahan Iklim, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup
 4. Kepala Pusat Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim, Deputi Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
 5. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah
 6. Ir. Hilman Manan, Dipl. HE, Masyarakat Peduli Air;
 7. Ir. Achmadi Partowijoto, CAE, Yayasan Kemitraan Air Indonesia;
 8. Ir. H. Winarno Tohir, Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan;
 9. Ir. Imam Mustofa, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia.

b. Tugas ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- b. Tugas Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a adalah menyusun rekomendasi Dewan Sumber Daya Air Nasional terkait dengan Pencapaian Target Surplus Beras 10 Juta Ton pada Tahun 2014 dan Pengurangan Resiko Kerugian Akibat Banjir.

KETIGA : a. Susunan keanggotaan Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b, sebagai berikut:

Ketua : Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan;

Wakil Ketua : Ir. S. Indro Tjahyono , Koordinator Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia;

Anggota : 1. Asisten Deputi Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup;

2. Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;

3. Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;

4. Direktur Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

5. Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Ir. Kusnaeni, Dipl.HE, Jaringan Informasi Komunikasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
8. DR. Ir. Bambang Widyantoro, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia;
9. Uly Harry Rusady, Yayasan Garuda Nusantara.

b. Tugas Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b adalah menyusun rekomendasi Dewan Sumber Daya Air Nasional terkait dengan Pencapaian Target Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 2,5 Juta Hektar dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Perbatasan Negara.

KEEMPAT : a. Susunan keanggotaan Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c, sebagai berikut:

Ketua : Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup;

Wakil Ketua : Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;

Anggota ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- Anggota : 1. Direktur Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Direktur Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan Perikanan;
5. Kepala Pusat Penelitian Limnologi, Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
7. Kepala Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan, Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian;
8. Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, Provinsi Riau;
10. Ir. Hendro Baroeno, Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Indonesia;
11. DR. Ir. H. Syaiful, DEA, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

b. Tugas Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c adalah menyusun rekomendasi Dewan SDA Nasional terkait dengan Pencapaian Target MDGs di Bidang Penyediaan Air Minum, dan Perbaikan Kualitas Air Sungai yang Melintasi Kawasan Perkotaan, Industri.

KELIMA : a. Susunan keanggotaan Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf d, sebagai berikut:

Ketua : Kepala Pusat Teknologi Kelistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Wakil Ketua : Ir. Tri Mumpuni, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia;

Anggota : 1. Direktur Lalulintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;

2. Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3. Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

3. Kepala Pusat Pengkajian kebijakan dan Iklim Usaha Industri, Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian
4. Ir. Bambang Kuswidodo, Dipl HE, Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar;
5. Lutfi Syarief, SE, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

b. Tugas Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf d adalah menyusun rekomendasi Dewan SDA Nasional terkait dengan upaya Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan Dari Tenaga Air dan Transportasi Sungai.

• **KEENAM** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KETUJUH : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini sampai dengan 30 Desember 2012.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional.

KESEMBILAN ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

KESEMBILAN : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Mei 2012

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN
SUMBER DAYA AIR NASIONAL,**

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kantor Biro Umum,



Bachry Soetjipto, S.H., M.H.

NIP. 1953.1005 197303 1 001